



LAPORAN

EVALUASI

PELAKSANAAN RKPD DAN

RENJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI NTB

TRIWULAN III TAHUN 2021

BAPPEDA PROVINSI NTB

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan III tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi NTB pada Triwulan III tahun 2021 berdasarkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Berdasarkan sasaran pembangunan daerah, dari 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 30 indikator (81,08%) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 7 indikator (18,92%) lainnya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 30 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan III tahun 2021 tersebut terdapat 17 indikator (45,95%) sudah memenuhi bahkan melampaui target dan 13 indikator (35,14%) lainnya belum memenuhi target. Secara umum rendahnya capaian di Triwulan III ini disebabkan karena adanya beberapa item kegiatan yang harus dilakukan revisi, rasionalisasi atau refocusing anggaran, pemberlakuan PPKM sebagai dampak covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penundaan pada triwulan IV, adanya kesalahan kode rekening kegiatan dan terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV tahun anggaran 2021.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2021

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan III merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan III tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.853.276.858.263,00 atau 52,25% dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp. 5.460.824.188.427,00.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran pada Triwulan III tahun 2021, menunjukkan bahwa terdapat 120 program prioritas pembangunan daerah dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 62,16% dengan capaian keuangan sebesar 43,82%. Sedangkan dari 281 Kegiatan, terdapat 214 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangan dan kinerjanya. Dari 281 kegiatan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi sub kegiatan sebanyak 861 sub kegiatan. Sebanyak 699 diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya, dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 64,83 % dan realisasi keuangan sebesar 47,69%.

Adapun capaian berdasarkan sasaran pembangunan daerah, dari 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 30 indikator (81,08%) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 7 indikator (18,92%) lainnya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 30 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan III 2021 tersebut terdapat 17 indikator (45,95%) sudah memenuhi target yaitu Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Opini BPK, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Rasio Elektrifikasi, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Indeks Kualitas Udara, Harapan Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase konektivitas transportasi publik, Rata rata Lama Sekolah, Cakupan Air Minum,

Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Air Laut, Persentase Balita Stunting. Meskipun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the right track*. Sedangkan Capaian terhadap Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB pada Triwulan III tahun 2021 secara keseluruhan dari 103 indikator terdapat 38 indikator (36,89%) tercapai, 23 indikator (22,33%) belum memenuhi target dan masih terdapat 42 indikator (40,78%) belum dapat dihitung/diukur karena capaiannya baru dapat dihitung diakhir tahun dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Rendahnya capaian di Triwulan III ini disebabkan karena adanya beberapa item kegiatan yang harus dilakukan revisi, rasionalisasi atau refocusing anggaran, pemberlakuan PPKM sebagai dampak covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penundaan pada triwulan IV, adanya kesalahan kode rekening kegiatan dan terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV tahun anggaran 2021.

DAFTAR ISI

.....i

KATA PENGANTAR.....i

RINGKASAN ii

DAFTAR ISI iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Tujuan..... 2

 1.4 Sasaran 2

 1.5 Sistimatika Penulisan Laporan 3

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 20214

 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2021 4

 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021 5

 2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021 6

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN
DAERAH DAERAH TAHUN 2021 10

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021
TRIWULAN III29

 4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada
 Triwulan III Tahun 202129

 4.2 Permasalahan89

BAB V : PENUTUP..... 90

 5.1 Kesimpulan90

 5.2 Rekomendasi.....91

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 merupakan perencanaan tahun ketiga penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan III tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/

kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2021 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2021;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2021.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2021. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2021. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan III Tahun 2021. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2021 sampai Triwulan III.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2021 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dengan strategi :
 - a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
 - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
 - c. Penanganan dampak ekonomi Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :
 - a. Pengembangan Sektor Pariwisata.
 - b. Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian, Kehutanan, Pertambangan dengan pola kemitraan.

- c. Mengoptimalkan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
 - d. Mengembangkan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluku. La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan).
 - e. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah.
3. Menjaga stabilitas makro ekonomi, dengan strategi :
- a. Mengendalikan inflasi.
4. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
- a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kab/Kota.
 - b. Mendorong Pemerataan Tingkat Pendapatan Masyarakat.
 - c. Mendorong Penurunan Tingkat Kemiskinan.
 - d. Memperluas Akses dan Kesempatan Kerja.
 - e. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu **"Menuju NTB yang Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah"**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2021 yaitu :

1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata
6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan tahun 2021 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan
Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			Point	123.11
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	78.56
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	71.97
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31.49
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	62.39
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.68
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.01
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui	Terwujudnya lingkungan hidup dan	Indeks Kualitas			Point	67.72
				Meningkatnya Kualitas, Daya	Indeks Kualitas Air	Point	42.83

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
	pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Lingkungan Hidup (IKLH)	Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Point	87.53
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.60
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67.70
			Neraca pengelolaan sampah			%	70.00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00
					Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	73.80
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.1
					Rasio Elektrifikasi	%	99.77
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,273
		Terwujudnya pariwisata	Pertumbuhan sektor			%	1.50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
		yang dapat diandalkan	kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	122.71
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	6.50
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	166.39
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.85
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41
			Partisipasi politik masyarakat			%	83.74
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59.81
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.60
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2021

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021. Adapun program pembangunan daerah pada tahun 2021 sebanyak 120 program dari 163 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan
29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung

31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
64. Program Penyuluhan Pertanian
65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial
102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Adapun Program prioritas dan program unggulan daerah yang dipetakan berdasarkan prioritas daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah, dengan program prioritas meliputi :

- a. Mitigasi bencana.
- b. Infrastruktur dasar.
- c. Infrastruktur kawasan.
- d. Konektivitas wilayah.
- e. Teknologi informasi dan komunikasi

Sedangkan program unggulannya antara lain: Desa Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana, Si-AGA, Rumah Layak Huni, Air Bersih untuk Semua, SPAM regional, Jamban Keluarga, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, dan Nusa Terang Benderang.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik , dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
- b. Optimalisasi Pendapatan daerah
- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain: eNTeBe Plan, NTB SDGs *centre, Research Based Policy*, IC pusat peradaban, NTB WTP, e-Samsat, Samsat Delivery, Bale Mediasi, Kampung Madani, Kampung Media, Sekolah Perjumpaan, NTB Satu Data, Satu Peta, Sakip level A, NTB *care*, Kota Layak Anak, Ramah *Difable*, Manajemen Talenta dan Agen Perubahan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan
- c. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- d. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain: Ayo Bercita-cita, 1000 Mahasiswa Luar Negeri, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, dan NTB juara.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan program prioritas meliputi:

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain: Tataruang Berkelanjutan, NTB *Zero Waste*, NTB hijau, Cagar Biosfer, Energi Baru Terbarukan, Pertanian Lestari, Desa Mandiri Pangan, Rinjani Tambora Global Geopark, Bank Sampah, Taman Asri.

5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pengentasan Kemiskinan
- b. Peningkatan investor sektor riil
- c. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- d. Pengembangan Pariwisata
- e. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- f. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Desa, STIP Inovatif, Industrialisasi Produk Pertanian, Rumah Kemasan, Koperasi Aktif, BUMDes Maju, UMKM Bersaing, NTB Ramah Investasi, Kampung Unggas, HHBK Unggul, 99 Desa Wisata, Apartemen Ikan.

6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Nilai Sosial Budaya dan Toleransi masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah
- c. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat
- d. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Sedangkan program unggulannya antara lain: IC pusat peradaban, , Bale Mediasi, Kampung Madani, Sekolah Perjumpaan, Kota Layak Anak.

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran
Pembangunan Pada Tahun 2021

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	123.11		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	25.48	4,159	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	44.69		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2,446	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	78.56		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	83.95	255,582	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	74.55	172,161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	50.83	4,436	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	94.37		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	30		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	46.20		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	59.39	564	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	711,669	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1,050	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	60	1,777	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	80	1,079	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	40	2,119	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	5.55	397	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	95	1,571	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	35.20	528	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	50.12	14,608	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	4,234	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	11,089	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP- nya	%	84.44	827	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	17,77	717	INSPEKTORAT

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%	80	1,148	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	2,834	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	16	6,500	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		88		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		132		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		16		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.09	16,446	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.03		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.13		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.55		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,70	243	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	181	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	871	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	15	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	60	4,644	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	45	1,707	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	20	420	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	30	409	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	75	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	977	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	179	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang			Badan Penghubung Daerah
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
Tujuan 3: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	71.97		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	150,430	Dinas Kesehatan
	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	65		
	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	80		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	94		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2	761	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	30	32	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	83	52,458	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	73.81	7,479	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	75.00	36,664	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	31.49		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	12.41		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	50	1,228	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	62.39		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.68		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.01		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	99.15	473,403	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	93,40		
	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	96.68		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	69.4		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1.01		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	1:18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:14		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	568	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	66,961	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	99.55		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	70		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	50		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		5.5		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	35	200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%	100	8,846	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67.72		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.83		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87.53		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.60		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	51.52	319	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	20	188	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	197	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67.70		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	67	19,206	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30,503	885	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	13.27	661	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4.00	4,449	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89.07	681	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	70.00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	70	4,823	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	73.80		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	3	493	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	715	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	87	531	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	50	735	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	116	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	9	44,458	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	561	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2,779	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	420	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	1.93	20,209	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	35.41	104,379	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	95.5	361	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	50	5,432	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	8.53	4,868	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	241,843	6,336	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,195,104	3,023	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.91	4,852	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	213130	616	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	764	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	2.5	17,317	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12,091	Dinas Sosial
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	71.97	215	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	3,517	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5.77	358	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	80.00	539	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	76.48	2,936	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.10		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	94.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84,393	256,813	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99.77		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.96	557	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%	99.77	1,552	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	1,943	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.81		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	60	280	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1,658	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	3	1,303	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	80	1,253	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	12,024	Dinas Perdagangan
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11,273		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	3,704	Dinas Perdagangan
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	1.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	122.71		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	65.66	4,993	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	37.5		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang	4,650,000	2,240	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%	30.21	165	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	60	1,063	Dinas Pariwisata
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	6.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	166.39		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	27,070	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	2.69	799	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem	%	1	540	Dinas Perindustrian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Informasi Industri Nasional				
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	5.99	1,280	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	50.32	2,122	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	16	830	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	44.71	992	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	21	300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	21	1,014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	14.85		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	458	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	10	3,328	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	87,427	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	60	6,798	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	14.43		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	60		
	Persentase Posyantek yang aktif	%	47.86		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	63.64	1,975	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	390	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	164	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100.00	2,864	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	51.72	730	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	1,711	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	83.74		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Keterlibatan Masyrkt dlm politik	%	0.80		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	80	4,654	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	79.66	489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59.81		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.6		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	60		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	52.17	1,769	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	75.52	806	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5	381	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	361	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		518	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 TRIWULAN III

4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2021

Sesuai Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan dari total 178 program perangkat daerah dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.853.276.858.263,00 atau 52,25% dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp. 5.460.824.188.427,00. Adapun total realisasi anggaran sampai Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp. 1.488.385.214.006,05 atau 27,26% terhadap total APBD dan 52,16 % terhadap total anggaran RKPD.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan III tahun 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 62,16% dengan capaian keuangan sebesar 43,82%. Rendahnya capaian ini disebabkan karena adanya penghentian sementara pelaksanaan kegiatan akibat refocusing anggaran serta pelaksanaan kegiatan diagendakan pada Triwulan III dan IV.
2. Dari 281 Kegiatan, terdapat 214 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangan dan kinerjanya. Dari 281 kegiatan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi sub kegiatan sebanyak 861 sub kegiatan. Sebanyak 699 diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya. Rata-rata capaian kinerja sebesar 64,83% dan realisasi keuangan sebesar 47,69%.

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana** dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah. Target tahun 2021 sebesar 0,61 poin, namun hingga triwulan III Tahun 2021, capaiannya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.
Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 47,84 % dan 48,31 % pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya:
 - a. Program Penanggulangan Bencana pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB dan Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna dengan target kinerja 25,48% dan 44,69%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pelayanan

Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (sub kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Penanganan Pascabencana Provinsi, Penyusunan Rencana Kontijensi), Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (sub kegiatan : Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana; Pencarian, Pertolongan, Evakuasi Korban Bencana; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana) dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (sub kegiatan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan). Dengan adanya refocusing anggaran, pembentukan DESTANA terkoreksi dari 20 Desa menjadi 10 Desa. Meskipun ada penurunan target, tetapi ada dukungan dari Kabupaten untuk pembentukan DESTANA sebanyak 7 Desa, yang terdiri dari KLU 4 Desa, Lombok Barat 1 Desa, Lombok Timur 1 Desa dan Lombok Tengah 1 Desa.

- b. Program Penanganan Bencana pada Dinas Sosial dengan indikator kinerja Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial.

2. **Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan. Target tahun 2021 sebesar 83,95% dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar 83,95%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 83,06% dan 59,81% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan target kinerja sebesar 83,95%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.

3. **Sasaran Meningkatnya pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Target tahun 2021 sebesar 50,04% dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar 50,04%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 77,45% dan 61,71% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi dengan target kinerja sebesar 74,55%. Bentuk

kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi; Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing; Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya; Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi) dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha - Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah;Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;Rehabilitasi Bendung Irigasi;Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;Operasional Unit Pengelola Irigasi).

4. **Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah** dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik. Target tahun 2021 sebesar 81,71% dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sudah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 86,00%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 51,60% dan 38,80% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 50,83 %), Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 94,37 %), Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik (target kinerja 30 %), Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (target kinerja 46,2 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; Pembangunan Gedung Terminal; Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi), Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal), Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Provinsi), Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi; Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi), Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi).

- b. Program Program Pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasarana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 59,39 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan

Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

5. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator kinerja Opini BPK. Target tahun 2021 yaitu status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan kondisi capaian pada triwulan III tahun 2021 adalah opini WTP, dan ini adalah capaian yang kesepuluh kali berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi NTB.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 58,67% dan 57,95 pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi (target kinerja 100 %), Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (target kinerja 100 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKP; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKP; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan Anggaran

- Belanja Daerah; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
- b. Program Program Pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasarana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 59,39 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan: Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

6. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Target tahun 2021 sebesar 35,41% dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sudah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 37,23%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 51,82% dan 42,17% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Derajat Desentralisasi Fiskal dengan target kinerja 35.2 %. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) dengan target kinerja sebesar 50.12 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP. Target kinerja tahun 2021 adalah kategori BB (73,01 – 76,00) dengan capaian kategori B.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 57,35% dan 51,19% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target kinerja 100 %. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (dengan sub kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi

- Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD; Pelaksanaan Musrenbang Provinsi; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi); Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan sub kegiatan: Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD; dan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota); Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan sub kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi; Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota).
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dengan target kinerja sebesar 100 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia); dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA); Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan).
- c. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya dengan target kinerja sebesar 84.44%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; dan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota.
 - d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM dengan target kinerja sebesar 17,77%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi; dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
 - e. Program Penataan Organisasi pada Biro Organisasi dengan indikator kinerja Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan dengan target kinerja yaitu Nilai BB. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan (sub kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi; Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan Penataan Analisis Jabatan) dan Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik).
 - f. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (sub kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan; Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum; dan Fasilitasi Penataan Wilayah), Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah (sub kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan; dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan) dan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (sub kegiatan : Fasilitasi

Kerjasama antar Pemerintah; Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama).

8. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Target kinerja tahun 2021 sebesar 0,68 poin, namun hingga triwulan III Tahun 2021, capaiannya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 79,5% dan 51,52% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Profesionalisme ASN, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Nilai Aspek Sistem Informasi (target capaian: 16%); Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan (target capaian: 80%); Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi (target capaian: 88%); Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan 132%); dan Nilai Aspek Sistem Informasi (target capaian: 16%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (sub kegiatan : Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK; Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Evaluasi Pemberhentian ASN; Fasilitas Lembaga Profesi ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; dan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian); Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN (Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; dan Pengelolaan Promosi ASN); Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN; Pengelolaan Assessment Center; Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN; Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN; Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN; Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional; dan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional), Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; dan Evaluasi Disiplin ASN).

- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial (target kinerja : 0.086%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional (target kinerja : 0.033%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis (target kinerja : 0.13%); dan Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi(target kinerja : 0.55%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi : Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tekhnis (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum) dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional; Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi; Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan).

9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik. Target kinerja tahun 2021 sebesar 4,23% namun hingga triwulan III Tahun 2021, capaiannya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 152,60% dan 58,06% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Kualitas

Pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk (target capaian: 98,7%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi : Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional; dan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk; dan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk).
- b. Program Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; dan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi); Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (sub kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan).
- d. Program Peningkatan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir (target capaian: 15%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (target capaian: 60%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Manusia; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi

- Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; dan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Layanan Berbasis TIK (target capaian: 45%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik).
 - g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (target capaian: 20%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektorial; Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektorial; Peningkatan Kapastitas Kelembagaan Statistik Sektorial; dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorial di Daerah).
 - h. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%) (target capaian: 20%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi); dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi).
 - i. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja (target capaian: 75%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
 - j. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik;

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.

- k. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi).
- l. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi (sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam); Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah (sub kegiatan : Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah); Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno; dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan).

10. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup. Target kinerja tahun 2021 sebesar 66,78 Tahun dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar 66,69 tahun.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 78,38% dan 36,66% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (target capaian: 85%), Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (target capaian: 97%); Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar (target capaian: 65%); Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (target capaian: 100%); Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% (target capaian: 80%); Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (target capaian: 94%); dan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional (target

capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota; Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota; Operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan); Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; dan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) dan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan) ; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (target capaian: 2%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP

- Provinsi (sub kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan); Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan).
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (target capaian: 30%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK); dan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional).
 - d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 83%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarpras dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan kesehatan.
 - e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 73,81%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; dan Operasional Pelayanan Rumah Sakit); dan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).
 - f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 75%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub

kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan); dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit).

11.Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Balita Stunting. Target kinerja tahun 2021 sebesar 31,49% dengan capaian kinerja sudah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 20,98%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 48,09% dan 50,31% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase balita Wasting (target capaian: 12,41. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (target capaian: 50%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi); Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat); Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM).

12.Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (Target: 13,68 Tahun) dan Rata rata Lama Sekolah Target : 7,01 Tahun). Kondisi capaian terakhir masing-masing indikator secara berturut-turut sebesar yaitu 13,90 tahun dan 7,38 tahun.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 61,87% dan 36,75% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 99.15 %); Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 93,408 %); Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (Target kinerja : 96.68%); Persen Angka

- Partisipasi Kasar (APK) SLB (Target kinerja : 69.4%); Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Target kinerja : 1.01 %); Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah (Target kinerja : 1:18); dan Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB (Target kinerja : 1:14). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (sub kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); Penambahan Ruang Kelas Baru; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Asrama Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (sub kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Ruang Praktik Siswa; Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah;Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus (sub kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus;Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus).
- b. Program Pengembangan Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kurikulum (Target kinerja : 99.15%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dengan sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah; dan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.
 - c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja : 100%);Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja : 99.55%); Persentase Kepala Sekolah

- bersertifikat (Target kinerja : 70%); Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 50%); Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) (Target kinerja : 5,5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi dengan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat); Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat).
- e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan (Target kinerja : 35%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.
- g. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (sub kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi; dan Partisipasi dan

Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent); Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (sub kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)); dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (sub kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan).

13.Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (target 42,83 poin), Indeks Kualitas Udara (target 87,53 poin) dan Indeks Kualitas Air Laut (target 70,29 poin. Capaian kinerja masing-masing indikator secara berturut-turut sebesar 44,53 poin, 88,85 poin dan 80,22 poin.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 68,33% dan 56,73% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (Target kinerja : 51,52 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi; dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (sub kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang; Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup).
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya (Target kinerja : 10 lokasi). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi); Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pembuatan (sub kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat).
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (Target kinerja : 1 lokasi). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- dengan indikator Kinerja Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya (Target kinerja : 210 unit). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan (Target kinerja : 20 kegiatan). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan (Target kinerja : 105). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
 - g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Target kinerja : 20 Pengaduan). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

14.Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Target kinerja tahun 2021 sebesar 67,70 poin dengan capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar 45,68 poin.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 66,66% dan 52,43% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi kelola (Target kinerja : 66,74 %) dan Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja : 10 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub

- kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan) ; Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun)
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (Target kinerja : 30503.3 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (sub kegiatan : Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi; Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi; Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi; Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi; Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi; dan Perencanaan Pengelolaan TAHURA); Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES); Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi;

- dan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi).
- c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase KTH yang meningkat kelasnya (Target kinerja : 13,27%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan; Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan; dan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
 - d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas (Target kinerja : 4 DAS). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS; Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS; dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS.
 - e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Target kinerja : 89,07%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang).

15. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah (target 50%) dan Persentase Pengurangan Sampah (target 20%). Kondisi capaian terakhir masing-masing indikator secara berturut-turut sebesar 36,63 % dan 9,05%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 38,00% dan 71,00% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Pengelolaan Persampahan, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pengelolaan sampah (Target kinerja : 70 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dengan sub kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional; Pengoperasian dan

Pemeliharaan TPA/TPST Regional; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional; dan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional).

16.Sasaran Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi. Target kinerja tahun 2021 sebesar 13.362 Milyar dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar 6.172 Milyar.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 85,27% dan 74,49% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Perentase Peningkatan Minat Investasi (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman); dan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi; dan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi).
- b. Program Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi; dan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Target kinerja : 87 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota (sub kegiatan : Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); dan Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi (sub kegiatan : Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik; Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan).

- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah (Target kinerja : 50 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

17.Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas dengan Indikator Kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan. Target kinerja tahun 2021 sebesar 23,52% dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar 22,88 %.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 51,13% dan 45,59% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Pertumbuhan Populasi Ternak (Target kinerja : 9 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor (sub kegiatan : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan; dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan); Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (sub kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; dan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain); Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi); Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan

- Ternak; Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan; dan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak); Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan).
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penataan Prasarana Pertanian (sub kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya); Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Terna; dan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak)
 - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi Phms (Target kinerja : <1%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; dan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular); Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; dan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi); Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (sub kegiatan : Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit; Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan; dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner); Kesejahteraan Hewan (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya).
 - d. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian); dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (sub kegiatan : Pelatihan dan

- bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani; Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani; dan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani).
- e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Sarana Pertanian (Target kinerja : 1,93%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (sub kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian); dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura; Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan).
 - f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian (Target kinerja : 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
 - g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian (Target kinerja : 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsid dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 - h. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok (Target kinerja : 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; dan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta); dan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani).
 - i. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan

- Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan); Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).
- j. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Target kinerja : 8,53%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat; Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi).
- k. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap (Target kinerja : 241843 Ton). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap

- untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil); Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT); Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (sub kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan); Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT (sub kegiatan : Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT); Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT; Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT).
- I. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya (Target kinerja : 1195104 Ton). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan); Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan

- Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi).
- m. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan (Target kinerja : 99,91%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil dengan sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan mil)
 - n. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi olahan hasil perikanan (Target kinerja : 213130 ton). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi; dan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing); Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; dan Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah).

18.Sasaran Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan. Target kinerja tahun 2021 sebesar 100% dengan capaian sudah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 100%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 24,26% dan 52,09% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (Target kinerja : 85 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Sarana di Fasilitas

- Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan); Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan); Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi); Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan); Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (Target kinerja : 2,5 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar); Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (sub kegiatan : Pengasuhan; Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar ; Anak Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang mudah Diakses; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemulasaraan); Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan

- Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; emberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA).
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (sub kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI; Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal); dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat).

19.Sasaran Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan

dengan Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Target kinerja tahun 2021 sebesar 86,20 poin dengan capaian kinerja sudah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 90,40 poin.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 97,99% dan 40,49% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan (Target kinerja : 71,97%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur; dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga

- Pangan (sub kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan; Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan); Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi); Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi (sub kegiatan : Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)).
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) (Target kinerja : 5,77%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi; dan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%) (Target kinerja : 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi; Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan).

20.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum. Target kinerja tahun 2021 sebesar 76,48% dengan capaian melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 81,51%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 75% dan 39,73% pada capaian keuangannya. Untuk memenuhi pelayanan dasar bagi penduduk miskin, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Cakupan air minum (Target kinerja : 76,48%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; dan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan.

21.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Target kinerja tahun 2021 sebesar 80,10% dengan capaian kinerja melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 80,27%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 39,00% dan 53,57% pada capaian keuangannya. Untuk memenuhi pelayanan dasar bagi penduduk miskin, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (Target kinerja : 94%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Luas kawasan permukiman yang berkualitas (Target kinerja : 84392,8 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman; dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

22.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi. Target kinerja tahun 2021 sebesar 99,77% dengan capaian kinerja sudah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 99,98%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 94,12% dan 54,44% pada capaian keuangannya. Untuk memenuhi pelayanan dasar bagi penduduk miskin, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui:

- a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik (Target kinerja : 5,96%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun); Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi (sub kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi; Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi ; Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi).

- b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Target kinerja : 99,77%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan (sub kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu; dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan).

23.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Rumah Layak Huni (RLH). Target kinerja tahun 2021 sebesar 62,65% namun hingga triwulan III Tahun 2021, capaiannya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian keuangan pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 46,13%. Untuk memenuhi pelayanan dasar bagi penduduk miskin, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui Program Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana; Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi); Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP); dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana).

24.Sasaran Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok dengan Indikator Kinerja Inflasi. Target kinerja tahun 2021 sebesar 3,0 – 4,0 % dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar 1,24%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 82,99% dan 58,52% pada capaian keuangannya. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting" (Target kinerja : 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor (sub kegiatan : Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar (Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya; dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya); Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana) (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA).
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (Target kinerja : 4%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor); Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota; dan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi); Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan

- Pestisida;Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi;Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi; dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi).
- c. Program Pengembangan Ekspor pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang (Target kinerja : 3%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pameran Dagang Internasional/ Nasional; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor ; Misi Dagang Bagi Pelaku Ekspor Unggulan ; Pameran Dagang Lokal; Peningkatan Citra Produk Ekspor).
 - d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Penyelesaian Sengketa (Target kinerja : 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen;Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen;Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen); Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen; Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen; dan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Verifikasi Mutu Produk; Pengembangan Layanan Pengujian; Pengembangan Layanan Sertifikasi; Pengembangan Layanan Kalibrasi).
 - e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi); Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi); dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan).

25.Sasaran Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan Indikator Kinerja Pengeluaran per kapita. Target kinerja tahun 2021 sebesar 11.273,02 (Ribu Rupiah) dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021. 10.377 (Ribu Rupiah).

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 10,37% dan 8,28% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui: Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja

Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; dan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

26.Sasaran Meningkatnya daya saing pariwisata dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar). Target kinerja tahun 2021 sebesar 122,71 (Milyar Rupiah) dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar -17,48 (Milyar Rupiah). Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Keuangannya sebesar 40,12%. Untuk meningkatkan daya saing pariwisata, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui:

Rata-Rata Capaian keuangan sebesar. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Persentase desa wisata yang dikembangkan (Target kinerja : 65,66%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi); Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan destinasi pariwisata provinsi); Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata).
- b. Program Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan (Target kinerja : 4.650.000 orang). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan sub kegiatan Penguatan promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif (Target kinerja : 30,21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dengan sub kegiatan Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik ; Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; dan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar (Target kinerja : 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tingkat Lanjutan dengan sub kegiatan Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kamitraan pariwisata; Pelatihan berbasis kompetensi bidnag homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan.

27. Sasaran Meningkatnya daya saing industri dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan. Target kinerja tahun 2021 sebesar 166,39 (Milyar Rupiah) dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar 17,62 (Milyar Rupiah).

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 76,06% dan 25,21% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan daya saing industri, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Target kinerja : 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.

- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha (Target kinerja : 5,99%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.
- e. Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya (Target kinerja : 50,32%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator Kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100%); dan Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

28.Sasaran Menurunnya pengangguran terbuka dengan Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Target kinerja tahun 2021 sebesar 3,30% dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sudah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 3,01%. Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 95,55% dan 38,10% pada capaian keuangannya. Untuk menurunkan pengangguran terbuka, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui:

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi (Target kinerja : 16%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi); Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (sub kegiatan : Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja); Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan

- Klaster Kompetensi (DBHCHT)); Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja).
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan (Target kinerja : 44,71%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota (sub kegiatan : Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal)); Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (sub kegiatan : Job Fair / Bursa Kerja); Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia; Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan);Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi).
 - c. Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial (Target kinerja : 21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi ; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi); Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK) (sub kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK).
 - d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3 (Target kinerja : 21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan;Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan; Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan).

29.Sasaran Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase penurunan konflik sosial. Target kinerja tahun 2021 sebesar 16,67%, namun hingga triwulan III Tahun 2021, capaiannya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 37,85% dan 48,60% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.
- c. Program Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Kinerja Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual (Kali) (sub kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali); dan Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)); Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen); Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen); Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)); Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)).
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Kinerja Persentase Lembaga Adat Aktif (Target kinerja : 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Program Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (Target kinerja : 63,64%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan); Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya); Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat)
 - f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
 - g. Program Pembinaan Sejarah dengan indikator Kinerja Cakupan pembinaan sejarah (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi dengan sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan

Lembaga Sejarah Lokal Provinsi; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah.

30.Sasaran Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Target kinerja tahun 2021 sebesar 5,41% dengan capaian hingga triwulan III Tahun 2021 sebesar -7,14%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 85,06% dan 56,07% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi; Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia; Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (sub kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur); Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; dan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS).
- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) (Target kinerja : 51,72%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

- c. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk; Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi ;Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi;Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat; Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun ; Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi; Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan (sub kegiatan : Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan; pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya; Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota); dan Bantuan Hukum dan HAM (sub kegiatan : Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum; dan Fasilitas Penyelesaian Non Litigasi dan HAM).

31.Sasaran Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik. Target kinerja tahun 2021 sebesar 0,80%, namun hingga triwulan III Tahun 2021, capaiannya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 61,67% dan 67,51% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terdapat beberapa program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui:

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik (Target kinerja : 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Ormas yang aktif (Target kinerja : 79,66%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

32.Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dengan target 18,60% dan Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak dengan target 60%. Kondisi capaian terakhir masing-masing indikator secara berturut-turut sebesar 0% dan 50%.

Secara Rata-Rata, Tingkat Capaian Kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 66,38% dan 30,69% pada capaian keuangannya. Untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan diantaranya melalui:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan PPRG (Target kinerja : 52,17%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi); dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi)
- b. Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (Target kinerja : 75,52%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

- Kewenangan Provinsi); Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi; dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi).
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga (Target kinerja : 5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi; dan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Dokumen Gender (Target kinerja : 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.
 - e. Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus; dan Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi).

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja Dan Keuangan berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 sampai Triwulan III

Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan III 2021	Tk Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan III 2021	Tk Capaian Kinerja & Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Th Pelaksanaan RPJMD/Renstra)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III			
Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65	0,61	-	-	-	0	0	0
Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	86,6	83,95		70,91	83,95	83,95	100	96,94
Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,5	50,04		66,00	50,04	50,04	100	91,82
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14	81,71		86,00	86,00	86,00	105,25	96,48
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	-	WTP	WTP	100,00	100	100
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65	35,41		33,28	37,23	37,23	105,14	96,33
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)	BB (73,01 - 76,00)	-	-	B	B	87,24	70
Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72	0,68	-	-	-	-	-	0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55	4,23	-	-	-	-	-	0
Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48	66,78	-	-	66,69	66,69	99,87	98,83
Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	30,49	31,49	-	-	20,98	20,98	133,38	68,81
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,68	-	-	13,90	13,90	101,61	100,80
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,07	7,01	-	-	7,38	7,38	105,28	104,38
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	43,03	42,83	-	-	44,53	44,53	103,97	103,49
	Indeks Kualitas Udara	Point	87,59	87,53	-	-	88,85	88,85	101,51	101,44
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66	87,6	-	-	80,22	80,22	91,58	91,51

Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan III 2021	Tk Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan III 2021	Tk Capaian Kinerja & Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Th Pelaksanaan RPJMD/Renstra)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III			
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,7	67,7	-	-	45,68	45,68	67,47	65,54
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	70	50		34,48	36,63	36,63	73,26	52,33
	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	20		7,35	9,05	9,05	45,25	30,17
Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	17814	13362		4.412,20	6.172,00	6.172,00	46,19	34,65
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88	23,52		22,88	22,88	22,88	97,28	95,81
Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100
Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,2	86,2	-	-	90,40	90,40	104,87	103,67
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	80,59	76,48	-	-	81,51	81,51	106,58	101,14
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46	80,1		80,20	80,27	80,27	100,21	97,34
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99,99	99,77		99,98	99,98	99,98	100,21	99,99
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95	62,65	-	-	-	-	-	0
Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	0,12	0,39	1,24	1,24	41,33	41,33

Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan III 2021	Tk Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan III 2021	Tk Capaian Kinerja & Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Th Pelaksanaan RPJMD/Renstra)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III			
Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11943,70147	11273,02017	-	-	10.377,00	10.377	92,05	86,88
Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	137,24	122,71	-	(87,42)	(17,48)	-17,48	- 14,24	-12,74
Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	179,91	166,39	-	23,09	17,62	17,62	10,59	9,79
Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,3	-	3,97	3,01	3,01	108,79	94,95
Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	0	16,67	-	-	-	-	-	0
Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07	5,41	-	-	(7,14)	(7,14)	-131,98	-117,63
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1	0,8	-	-	-	-	-	0
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47	18,6	-	-	-	-	-	0
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100	60	-	-	50,00	50,00	83,33	50,00

4.2 Pencapaian Indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 pada Triwulan III Tahun 2021

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD):

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama sebagai berikut: Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi publik, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Pelayanan Publik, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Inflasi, Pengeluaran per kapita, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

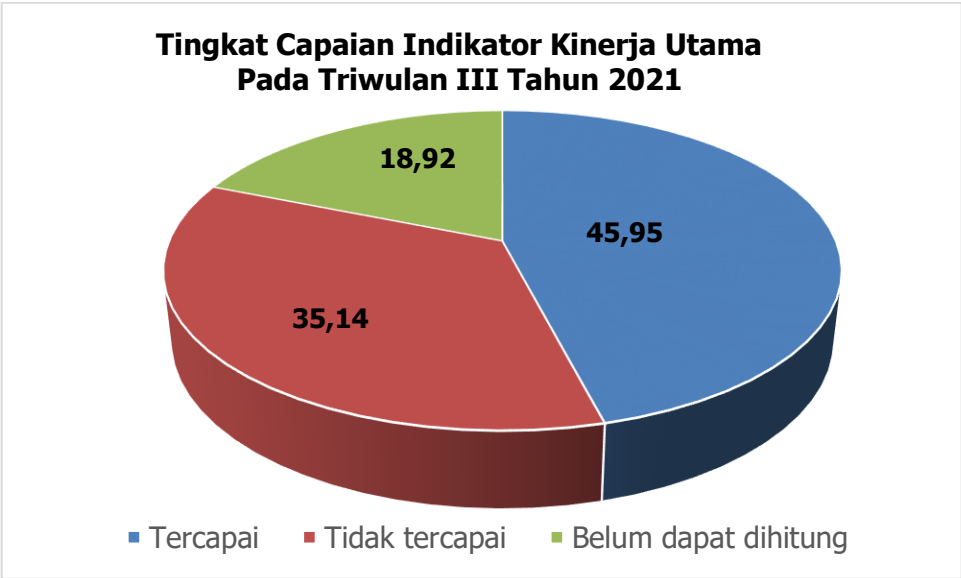
Adapun tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap sasaran pembangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	2021		
		Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAN melalui Penguatan mitigasi bencana dan Pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah				
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,61	0,00	0,00
2	Persentase Kemantapan jalan	83,95	83,95	100,00
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	50,04	50,04	100,00
4	Persentase konektivitas transportasi publik	81,71	86,00	105,25
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi				
5	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	35,41	37,23	105,14
7	Nilai SAKIP	BB (73,01 - 76,00)	B	87,24
8	Indeks Profesionalisme ASN	0,68	0,00	0,00
9	Indeks Pelayanan Publik	4,23	0,00	0,00

No	Indikator	2021		
		Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah				
10	Angka Harapan Hidup	66,78	66,69	99,87
11	Persentase Balita Stunting	31,49	20,98	133,38
12	Harapan Lama Sekolah	13,68	13,90	101,61
13	Rata rata Lama Sekolah	7,01	7,38	105,28
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan				
14	Indeks Kualitas Air	42,83	44,53	103,97
15	Indeks Kualitas Udara	87,53	88,85	101,51
16	Indeks Kualitas Air Laut	70,29	80,22	114,13
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,70	45,68	65,26
18	Persentase Penanganan Sampah	50,00	36,63	73,26
19	Persentase Pengurangan Sampah	20,00	9,05	45,25
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi				
20	Nilai Realisasi Investasi	13.362	6172,00	46,19
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	23,52	22,88	97,28
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100,00	100,00	100,00
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,20	90,40	104,87
24	Cakupan Air Minum	76,48	81,51	106,58
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	80,10	80,27	100,21
26	Rasio Elektrifikasi	99,77	99,98	100,21
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	62,65	0,00	0,00
28	Inflasi	3,0 - 4,0	1,24	41,33
29	Pengeluaran per kapita	11.273,02	10377,00	92,05
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	122,71	-17,48	-14,24
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	166,39	17,62	10,59
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30	3,01	108,79
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan				
33	Persentase penurunan konflik sosial	16,67	0,00	0,00
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5,41	-7,14	-131,98
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,80	0,00	0,00
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	18,60	0,00	0,00
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	60,00	50,00	83,33

Dari 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 30 indikator (81,08%) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 7 indikator (18,92%) lainnya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 30 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan III 2021 tersebut terdapat 17 indikator (45,95%) sudah memenuhi target yaitu Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Opini BPK, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Rasio Elektrifikasi, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Indeks Kualitas Udara, Harapan Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase konektivitas transportasi publik, Rata rata Lama Sekolah, Cakupan Air Minum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Air Laut, Persentase Balita Stunting. Meskipun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut on the right track.



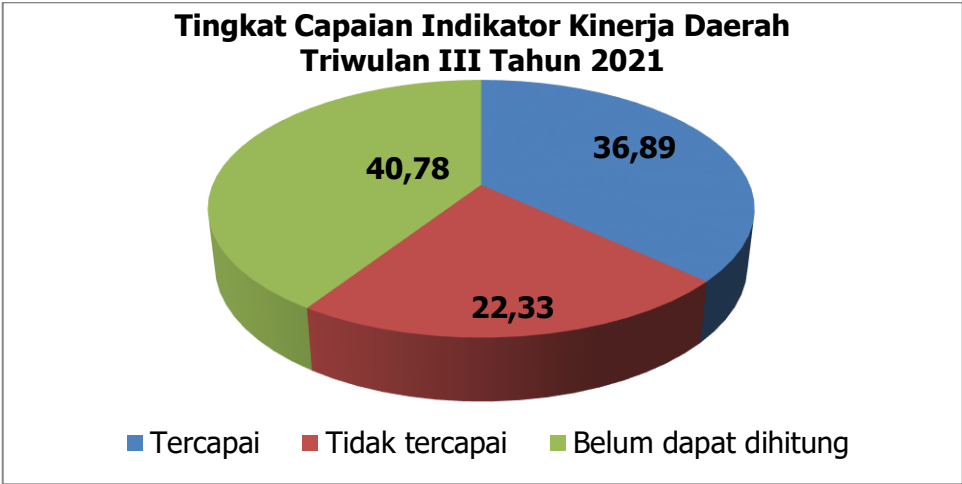
2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan dan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambahan Biji Logam, Inflasi, Angka Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); aspek daya saing daerah dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Ketaatan Terhadap RTRW, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik; serta aspek pelayanan umum yang diukur dengan 92 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar

sebanyak 21 indikator (tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar), urusan wajib bukan pelayanan dasar sebanyak 31 indikator (tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar), urusan pilihan sebanyak 20 indikator (tersebar pada 8 urusan pilihan), unsur pendukung urusan pemerintahan sebanyak 5 indikator, unsur peninjang urusan pemerintahan sebanyak 7 indikator (tersebar pada 5 urusan pemerintahan), unsur pengawasan urusan pemerintahan sebanyak 1 indikator dan unsur pemerintahan umum sebanyak 5 indikator.

Capaian terhadap Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB pada Triwulan III tahun 2021 secara keseluruhan dari 103 indikator terdapat 38 indikator (36,89%) tercapai, 23 indikator (22,33%) belum memenuhi target dan masih terdapat 42 indikator (40,78%) belum dapat dihitung/diukur karena capaiannya baru dapat dihitung diakhir tahun dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.



Deskripsi capaian Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	2,5-3,5	3,07	100
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	1,24	41,33
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,42	14,14	94,63
4	Gini Ratio	Point	0,353	0,381	92,19
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,84	68,65	99,72

Dari 5 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, hingga triwulan III Tahun 2021, hanya indikator Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam yang sudah mencapai target, sedangkan 4 indikator lainnya masih belum memenuhi target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021. Ekonomi Nusa Tenggara Barat tanpa tambang bijih logam pada triwulan III-2021 tumbuh sebesar 3,07 persen dibanding Triwulan II Tahun 2020.

Pertumbuhan tertinggi dialami oleh kategori Konstruksi sebesar 14,82 persen, diikuti oleh Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,70 persen dan Kategori Jasa Pendidikan sebesar 4,06 persen. Selain mengalami pertumbuhan, beberapa kategori lainnya mengalami kontraksi, yaitu kategori Penyediaan akomodasi makan dan minum berkontraksi sebesar 6,44 persen, diikuti oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,12 persen dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi sebesar 1,07 persen.

Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian NTB masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,39 persen; diikuti oleh Pertambangan dan penggalian sebesar 16,70 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,92 persen; dan Konstruksi sebesar 10,33 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian NTB mencapai 64,34 persen.

Indikator kemiskinan mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi NTB, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2020 tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23 persen). Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2020 – Maret 2021 yaitu sebesar 0,09 persen poin. Akan tetapi, nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 713,89 ribu orang (13,97 persen)

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 0,381. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,386. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,376, Gini Ratio Maret 2021 naik sebesar 0,005 poin. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,413 mengalami kenaikan 0,008 poin dibanding dengan Gini Ratio September 2020 dan naik sebesar 0,01 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,403. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,332, turun 0,004 poin dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,336. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 nilai ini turun 0,005 poin. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,35 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,84 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,27 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

b) Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 7 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2.2 Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kriminalitas	Point	14,85		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
2	Indeks Aksesibilitas	Point	78,56		
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67,98	70,23	96,69
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	89,03		
5	Indeks Risiko Bencana	Point	123,11		
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B		
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,23		

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah dapat dihitung capaian indikatornya, namun belum memenuhi target tahun 2021. Sedangkan 6 indikator pada Aspek Daya Saing Daerah belum tersedia (*Not Available*) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.

c) Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 91 indikator kinerja untuk mengukur pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 38 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 13 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.3 Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01	Pendidikan				
1	Indeks Pendidikan	Point	62,39	63,21	101,32
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,9	101,61
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,01	7,38	105,28
1.02	Kesehatan				
4	Indeks Kesehatan	Point	71,97	71,83	99,81
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	77,00	83,23	108,09
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,10	80,27	100,21
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,78	66,69	99,87
8	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31,49	20,98	133,38
9	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100	100
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
11	Persentase Kemantapan jalan	%	83,95	83,95	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
12	Cakupan Air Minum	%	76,48	81,51	106,58
13	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,04	50,04	100,00
14	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	9,09		
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
15	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62,65		
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
16	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,41	-7,14	(131,98)
17	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00
18	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00
19	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	20,97		
20	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,61		
1.06	Sosial				
21	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00
22	Persentase PMKS yang tertangani	%	4,87		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01	Tenaga Kerja				
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	3,01	108,79
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
24	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59,81		
25	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,46		
26	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,70		
27	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60		
28	Cakupan Kabupaten/KotaYang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60,00	50,00	83,33
2.03	Pangan				
29	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,20	90,40	104,87
2.04	Lingkungan Hidup				
30	Indeks Kualitas Air	Point	42,83	44,53	103,97
31	Indeks Kualitas Udara	Point	87,53	88,85	101,51
32	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70,29	80,22	114,13
33	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	70,00	45,68	65,26
34	Persentase Penanganan Sampah	%	50,00	36,63	73,26
35	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	9,05	45,25
2.05	Pertanahan				
36	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
37	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,84		
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
38	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	29,01	43,44	149,74
39	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	86,00	92,74	107,84
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
40	Pertumbuhan Penduduk	%	1,04		
2.09	Perhubungan				
41	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81,71	86	105,25
2.10	Komunikasi dan Informatika				
42	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Interaktif		
43	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	50		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
44	Persentase Koperasi Aktif	%	65,00	76,12	117,11
2.12	Penanaman Modal				
45	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13.362	6.172,0	46,19
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
46	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	35		
47	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	4	26,67
48	Proporsi wirausaha muda	%	68,18		
2.14	Statistik				
49	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	30,00		
2.15	Persandian				
50	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	II+		
2.16	Kebudayaan				
51	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	24,35		
2.17	Perpustakaan				
52	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00	100,00	100,00
53	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	31,89	32,76	102,74
2.18	Kearsipan				
54	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	66,67	67,45	101,18
3	URUSAN PILIHAN				
3.01	Kelautan dan Perikanan				
55	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,75		
56	Produksi Perikanan	Ton	1.436.947	1.005.863	70,00
57	Nilai Tukar Nelayan	%	>110	112,70	102,45
3.02	Pariwisata				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
58	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	1,50	-6,44	(429,33)
59	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	60,00		
60	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,10	2,26	72,90
61	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.650.000		
62	Persentase Geosites yang Tertata	%	25,00		
63	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	122,71	(17,48)	(14,24)
3.03	Pertanian				
64	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,52	22,88	97,28
65	Nilai Tukar Petani	Point	>105	106,84	101,75
3.04	Kehutanan				
66	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67,70	58,59	55,80
67	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	10,08		
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				
68	Rasio Elektrifikasi	%	99,77	99,98	100,21
3.06	Perdagangan				
69	Indeks Daya Beli	Point	73,80		
70	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.273	10.377	92,05
3.07	Perindustrian				
71	Pertumbuhan Industri	%	6,50		
72	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	166,39	17,62	10,59
73	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	2,69		
3.08	Transmigrasi				
74	Cakupan Penempatan Transmigran	%	90	90	100,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
75	Ranking Nasional LPPD	Ranking	7		
76	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00
77	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00
78	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	28,00	100,00	
79	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3	3	100,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	Perencanaan				
80	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
5.02	Keuangan				
81	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100
82	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,50	0,50	100,00
83	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35,41	37,23	105,14
5.03	Kepegawaian				
84	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,68		
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
85	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,25		
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
86	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	24,00		
5.06	Penghubung				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	Pengawasan				
87	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)	B	87,24
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
88	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,46		
89	Partisipasi Politik Masyarakat	%	83,74		
90	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	30,00		
91	Persentase penurunan konflik sosial	%	16,67		
92	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,80		

Dari 92 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 37 indikator (40,22%) tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 18 indikator belum memenuhi target, namun 6 indikator diantaranya dengan tingkat capaiannya sangat tinggi mencapai diatas 80%. Dan masih terdapat 37 indikator belum tersedia (*Not Available*) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang tercapai antara lain: Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas, Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Cakupan Penempatan Transmigran, Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, Opini BPK, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Elektrifikasi, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Persentase Arsip yang Terselamatkan, Indeks Pendidikan, Indeks Kualitas Udara, Harapan Lama Sekolah, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Indeks Kualitas Air, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi,

Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase konektivitas transportasi publik, Rata-rata Lama Sekolah, Cakupan Air Minum, Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Air Laut, Persentase Koperasi Aktif, Persentase Balita Stunting, Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan.

4.3 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan III Tahun 2021 yaitu:

1. Dalam RKPD Tahun 2021, terdapat beberapa istilah program antara lain program prioritas, program unggulan, dengan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang secara nomenklatur berbeda satu sama lain dan memiliki level pengukuran yang sama dan tidak ada pemetaan yang menunjukkan keterkaitan satu sama lain;
2. Tidak tersedia penjabaran dan target yang akan dicapai pada setiap program prioritas dan program unggulan sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengukuran capaian pada setiap program prioritas dan program unggulan;
3. Rendahnya capaian di Triwulan III ini disebabkan sebagai berikut:
 - a. Sebagian besar belum dapat diukur sampai Triwulan III,
 - b. adanya penghentian sementara pelaksanaan kegiatan akibat refocusing anggaran
 - c. Kegiatan yang bersifat fisik masih dalam proses penyelesaian tender
 - d. Pelaksanaan kegiatan diagendakan pada Triwulan IV.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD Tahun 2021 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;
2. Tidak tersedia pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan program prioritas dan program unggulan;
3. Dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja sudah mencapai 62,16% dengan realisasi keuangan sebesar 43,82%. Capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II yang baru mencapai 30,73% pada realisasi kinerja dan 21,14% pada realisasi keuangan.
4. Dari 281 Kegiatan, terdapat 214 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangan dan kinerjanya. Dari 281 kegiatan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi sub kegiatan sebanyak 861 sub kegiatan. Untuk sub kegiatan, sebanyak 699 diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya. Rata-rata capaian kinerja sebesar 64,83 % dan realisasi keuangan sebesar 47,69%.
5. Dari 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 30 indikator (81,08%) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 7 indikator (18,92%) lainnya masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 30 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan III 2021 tersebut terdapat 17 indikator (45,95%) sudah memenuhi target yaitu Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Opini BPK, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Rasio Elektrifikasi, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Indeks Kualitas Udara, Harapan Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase konektivitas transportasi publik, Rata rata Lama Sekolah, Cakupan Air Minum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Air Laut, Persentase Balita Stunting. Meskipun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the right track*.
6. Capaian terhadap Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB pada Triwulan III tahun 2021 secara keseluruhan dari 103 indikator terdapat 38 indikator (36,89%) tercapai, 23 indikator (22,33%) belum memenuhi target dan masih terdapat 42 indikator (40,78%) belum dapat dihitung/diukur karena capaiannya baru dapat dihitung diakhir tahun dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2021;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;
5. Perlu percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk mengefektifkan pencapaian kinerja dan anggaran;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala, agar monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikendalikan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.